

BAB I

PENDAHULUAN

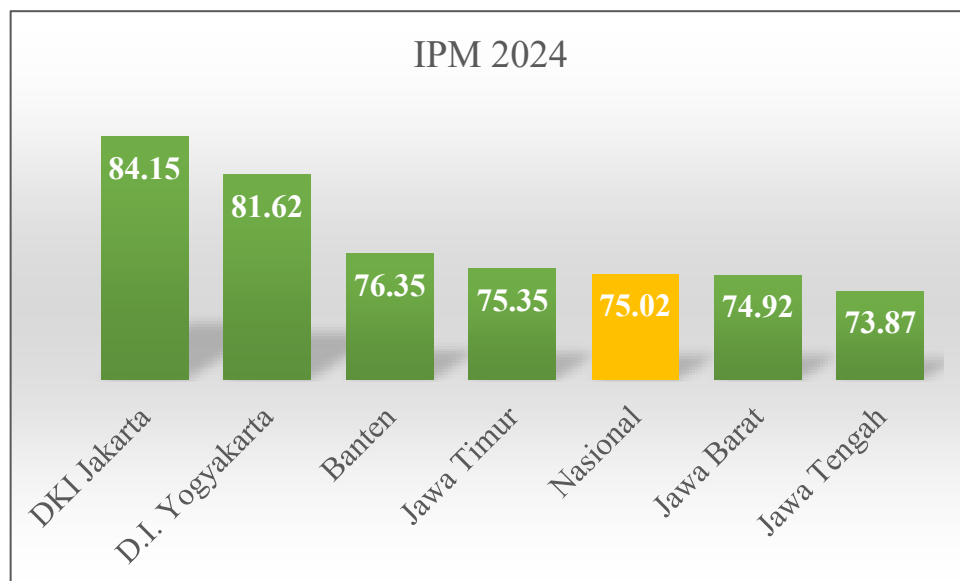
1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1998 Republik Indonesia mengalami krisis ekonomi dan kepercayaan hal tersebut membuat terjadinya reformasi yang memberikan dampak pada seluruh aspek kenegaraan. Hal ini disebabkan oleh diterapkannya sistem sentralisasi yang berdampak pada terlalu banyaknya campur tangan pemerintah pusat yang menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan. Sentralisasi merupakan proses memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi (Nuradhawati, 2019). Dampak dari sistem sentralisasi menimbulkan rendahnya akuntabilitas, menghambat pembangunan infrastruktur sosial, serta menghambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah (Mardiasmo, 2021). Upaya dalam menangani dampak dari diterapkannya sistem sentralisasi yang digunakan pada pemerintahan lama, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi awal pengembangan otonomi daerah. Undang-Undang 23 Tahun 2014 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum mengenai pemerintahan daerah termasuk otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan adanya sistem desentralisasi untuk melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pelaksanaan desentralisasi memiliki banyak tujuan yang perlu dicapai oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.

Tujuan untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dilalui dengan terpenuhinya beberapa komponen yang menjadi indikator untuk pembentukan indeks pembangunan manusia yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Komponen ini merupakan hal yang perlu diprioritaskan dalam pembentukan kebijakan maupun perencanaan anggaran oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia.

Pada Tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat berada di peringkat 15 dibandingkan dengan 38 Provinsi di Indonesia dan nilai yang dihasilkan juga berada di bawah rata-rata nasional seperti pada Gambar 1.1. Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga berada di peringkat 4 dari 6 provinsi yang berada di Pulau Jawa (BPS, 2024). Tentunya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia apalagi provinsi Jawa Barat memiliki bonus demografi yang besar. Bonus demografi ini seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pembangunan manusia yang baik agar bisa memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan bermasyarakat.



Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa

Selanjutnya, nilai rata-rata indeks pembangunan manusia pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat juga masih berada di bawah nilai rata-rata provinsi. Sebanyak 17 Kabupaten/Kota masih berada di bawah nilai rata-rata. Terdapat ketimpangan yang besar antara kabupaten/kota yang memiliki nilai

terendah dan tertinggi hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan pada komponen-komponen pembentuk indeks pembangunan manusia. Komponen indeks pembangunan manusia yang memiliki nilai ketimpangan tersebut adalah komponen dalam dimensi pendidikan dan standar hidup layak. Komponen pendidikan memiliki hal yang memberikan pengaruh seperti persentase penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, fasilitas pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Sedangkan dalam komponen standar hidup layak, hal yang menjadi pengaruh terhadap nilai indeks pembangunan manusia yaitu kenaikan PDRB dan PDRB per kapita, penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan jumlah pekerja, penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, serta Peningkatan TPAK dan penurunan TPT. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai terbesar di Indonesia hal ini mencerminkan kondisi penyerapan tenaga kerja yang memerlukan perhatian dan perbaikan karena akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat (BPS, 2024).

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memperhatikan bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dilihat dengan hasil kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah harus seimbang dengan kesejahteraan masyarakat yakni tujuan utama pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah, sehingga pemakaian APBD akan memberi dampak terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat (Riksa Wibawa et al, 2021).

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dengan melakukan analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari beberapa kategori seperti kewajiban dan ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain. Dukungan dalam menunjang kebutuhan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kualitas manusia dibutuhkan pendapatan daerah yang maksimal. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dapat dilihat dari penerapan desentralisasi fiskal, bagaimana ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.

Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap nilai indeks pembangunan manusia. Desentralisasi fiskal menggambarkan bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Desentralisasi fiskal juga berfungsi untuk memberikan gambaran bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola keuangannya secara mandiri untuk menerima pendapatan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan peningkatan pendapatan dari masing-masing daerah karena kebijakan yang diciptakan bisa sesuai dengan kondisi yang dialami oleh daerah tersebut. Terjadinya peningkatan pendapatan diharapkan pemerintah daerah dapat semakin mandiri dalam hal pengelolaan keuangan dan mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari

pemerintah pusat. Peningkatan pendapatan juga akan berdampak pada pelayanan publik yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut akan sejalan dengan peningkatan nilai indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Ketergantungan keuangan daerah dapat memperlihatkan perbandingan total penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dengan total penerimaan daerah. Hasilnya dapat menunjukkan bagaimana ketergantungan pembiayaan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan sendiri dan memanfaatkan potensi ekonomi di daerah untuk menjadi sumber pendapatan. Ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi dikarenakan kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang ada untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Selain itu, dengan adanya kesenjangan dalam kemandirian fiskal antar daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masih belum merata. Adanya perhitungan ketergantungan daerah diharapkan pemerintah daerah bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sumber potensi ekonomi yang bisa menjadi alat dorong bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah masing-masing sehingga bisa membuat kebijakan mengenai peningkatan nilai komponen-komponen indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, jika ketergantungan keuangan daerah menurun maka nilai indeks pembangunan manusia diharapkan semakin meningkat.

Terakhir, efektivitas pendapatan asli daerah juga berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia setelah desentralisasi fiskal dan ketergantungan keuangan daerah. Efektivitas pendapatan dapat dihitung melalui perbandingan dari realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Melalui perhitungan ini pemerintah daerah dapat menunjukkan bagaimana kemampuannya dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi dari efektivitas pendapatan diharapkan dapat menghasilkan optimalisasi pelayanan publik dengan penyerapan pendapatan sesuai dengan anggaran nantinya pemanfaatan pendapatan dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang mencakup penyediaan infrastruktur dan fasilitas di bidang kesehatan dan pendidikan juga layanan sosial lainnya yang nantinya akan berdampak juga pada peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat” (Riksa Wibawa et al., 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Pada pemilihan tahun pengamatan penelitian yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2016-2020, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2020-2024.
2. Pada variabel penelitian yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti variabel desentralisasi, kemandirian daerah, dan ketergantungan daerah, sedangkan

penelitian ini menggunakan variabel desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas PAD.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Desentralisasi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. Bagaimana Ketergantungan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. Bagaimana Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
4. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
5. Seberapa besar Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

6. Seberapa besar Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
7. Seberapa besar Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pusat Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui tingkat Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memberikan batasan masalah agar penelitian lebih terfokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan yaitu Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna, baik secara teoritis dan praktis baik bagi penulis maupun instansi itu sendiri.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap indeks pembangunan manusia yang ditinjau dari desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas pendapatan daerah. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang tertarik di bidang kajian ini. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat melatih pola pikir secara ilmiah dan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti.

b. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam membuat kebijakan atau keputusan, menjadi pertimbangan untuk menghasilkan solusi dalam memecahkan masalah masyarakat, dan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan pembandingan penelitian selanjutnya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan pada Februari 2025 sampai dengan selesai.